ABSTRAK

RIZKI ANGGISTA, 126101212149, Tinjauan Yuridis Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Prasmanan (Studi Kasus Rumah Makan Prasmanan BTA Dan Kartika), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2024, Pembimbing : Hiba Fajarwati., S.H., LL.M

Kata Kunci : Jual Beli, Sistem Prasmanan, Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena berkembangnya sistem jual beli dengan model prasmanan di berbagai rumah makan di Indonesia, termasuk di Kecamatan Tulungagung, yang melibatkan Rumah Makan BTA dan Kartika sebagai objek penelitian. Sistem prasmanan, yang pada dasarnya memungkinkan konsumen untuk memilih dan mengambil makanan sesuai dengan keinginan mereka sebelum melakukan pembayaran, telah menjadi pilihan populer bagi banyak konsumen yang menginginkan kemudahan dan kebebasan dalam memilih makanan. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan bagi konsumen, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpastian harga dan porsi makanan yang dibeli, yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi konsumen dan mempengaruhi pelaksanaan transaksi jual beli itu sendiri.

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana sistem jual beli prasmanan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam transaksi jual beli sistem prasmanan dan bagaimana praktik-praktik yang dilakukan oleh rumah makan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana praktik jual beli prasmanan pada Rumah Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung ? 2) Bagaimana Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur jual beli dengan sistem prasmanan ?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengidentifikasi terkait pelaksanaan praktik jual beli prasmanan pada Rumah Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung. 2) Untuk mengidentifikasi terkait Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang jual beli dengan menggunakan sistem prasmanan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Adapun pendekatanya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan Verifikasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik jual beli prasmanan di Rumah Makan BTA dan Kartika menerapkan model bisnis yang menitikberatkan kenyamanan dan fleksibilitas bagi pelanggan. Di Rumah Makan Kartika, sistem prasmanan dimulai dari kebiasaan pelanggan yang lebih suka mengambil makanan sendiri, sedangkan di Rumah Makan BTA, sistem ini diperkenalkan setelah analisis pasar lokal yang menunjukkan minimnya penerapan model ini di daerah tersebut Kedua rumah makan menggunakan sistem pembayaran yang berbeda. Kartika menerapkan sistem di mana pelanggan memilih makanan, mencatat pesanan, dan membayar setelah makan dengan menyebutkan nama mereka. Di sisi lain, BTA menggunakan sistem di mana karyawan mencatat pesanan langsung di meja dan pembayaran dilakukan setelah selesai makan, meskipun tantangan muncul terkait transparansi harga. Di Kartika, harga dihitung berdasarkan porsi, sedangkan di BTA, harga ditentukan oleh jenis lauk yang diambil. Meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas, terdapat potensi kebingungan bagi pelanggan baru mengenai harga yang berlaku. 2) Praktik jual beli prasmanan pada Rumah Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam hal ini, kedua rumah makan menerapkan sistem jual beli yang dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli biasa, di mana pembeli memilih makanan yang diinginkan dan membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan. Praktik tersebut masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan transparansi harga dan ketidakpastian mengenai jumlah makanan yang akan dibeli, yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen jika tidak dijelaskan secara jelas. Dalam perspektif KUHPerdata, prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam kontrak jual beli harus dijunjung tinggi. Sedangkan dalam KHES, penting untuk menghindari praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) dan riba (keuntungan yang tidak adil). Terkait dengan aturan hukum, KUHPerdata mengatur tentang kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembeli, termasuk harga dan spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan. Begitu juga dalam KHES, transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur penipuan. Oleh karena itu, disarankan agar rumah makan yang menerapkan sistem prasmanan memperbaiki aspek transparansi harga dan informasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dari segi hukum perdata maupun ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua rumah makan sudah melakukan transaksi jual beli dengan sistem prasmanan, namun perlu adanya perbaikan terutama dalam hal transparansi harga dan kejelasan informasi bagi konsumen. Untuk itu, kedua rumah makan disarankan untuk memperbaiki sistem komunikasi harga dan porsi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi syariah, guna memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

ABSTRACT

RIZKI ANGGISTA, 126101212149, Juridical Review in the Perspective of the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law in Buffet System Sale and Purchase Transactions (Case Study of BTA and Kartika Buffet Restaurant), Sharia Economic Law Study Program, Sharia Department, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University, 2024, Supervisor: Hiba Fajarwati, S.H., LL.M.

Keywords : Sale and Purchase, Buffet System, Civil Law, Compilation of Sharia Economic Law

This research is motivated by the phenomenon of the development of a buying and selling system with a buffet model in various restaurants in Indonesia, including in Tulungagung District, which involves BTA and Kartika Restaurants as research objects. The buffet system, which basically allows consumers to choose and take food according to their wishes before making payment, has become a popular choice for many consumers who want convenience and freedom in choosing food. Although this system offers convenience to consumers, there are still various problems related to the uncertainty of the price and portion of the food purchased, which can cause potential losses to consumers and affect the implementation of the sale and purchase transaction itself.

In this case, it is important to further analyze how this buffett buying and selling system is in line with applicable legal provisions, both from the perspective of civil law and sharia economic law. Therefore, this research aims to provide a deeper understanding of how these legal rules can be applied in buffet system sale and purchase transactions and how the practices carried out by restaurants can be adjusted to the applicable legal principles.

Problem Formulation: 1) How is the practice of buying and selling buffets at BTA and Kartika Restaurants in Tulungagung District? 2) How does the Civil Code and the Compilation of Sharia Economic Law regulate buying and selling with a buffet system? The objectives of this research are: 1) To identify the implementation of the practice of buying and selling buffets at BTA and Kartika Restaurants in Tulungagung District. 2) To identify the civil code and the Compilation of sharia economic law that regulates buying and selling using a buffet system.

In this study, researchers used a type of field research with qualitative methods. The approach uses a normative juridical approach. In collecting data, researchers used interview, observation, and documentation techniques. While the data analysis technique in this study uses data condensation, data presentation, conclusions and verification. The data validity test in this study uses the technique of extended observation, increased persistence in observation, triangulation.

The results of this study show that: 1) The practice of buying and selling buffets at BTA and Kartika Restaurant applies a business model that emphasizes convenience and flexibility for customers. In Rumah Makan Kartika, the buffet system started from the habit of customers who prefer to take their own food, while in Rumah Makan BTA, this system was introduced after a local market analysis that showed the lack of application of this model in the area.Both restaurants use

different payment systems. Kartika implements a system where customers pick the food, record the order, and pay after the meal by mentioning their names. On the other hand, BTA uses a system where employees record orders directly at the table and payment is made upon completion of the meal, although challenges arise regarding price transparency. At Kartika, the price is calculated based on the portion, whereas at BTA, the price is determined by the type of side dish taken. While this system provides flexibility, there is potential confusion for new customers regarding the applicable prices. 2) The practice of buying and selling buffets at BTA and Kartika Restaurants in Tulungagung District has been carried out in accordance with applicable legal provisions, both from the perspective of the Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). In this case, both restaurants apply a buying and selling system that can be categorized as ordinary buying and selling transactions, where buyers choose the food they want and pay according to the set price. The practice still faces several challenges related to price transparency and uncertainty regarding the amount of food to be purchased, which can potentially cause harm to consumers if not clearly explained. From the perspective of the Civil Code, the principles of prudence and clarity in the sale and purchase contract must be upheld. Whereas in KHES, it is important to avoid practices that contain elements of gharar (uncertainty) and usury (unfair profit). Related to the rule of law, the Civil Code regulates the seller's obligation to provide clear information to the buyer, including the price and specifications of the goods or services offered. Likewise, in KHES, transactions must be carried out fairly, transparently, and without any elements of fraud. Therefore, it is recommended that restaurants that apply the buffet system improve aspects of price transparency and information to comply with applicable legal principles, both in terms of civil law and Islamic economics.

Based on the results of this study, it can be concluded that although the two restaurants have conducted sales and purchase transactions with a buffet system, there is a need for improvement, especially in terms of price transparency and clarity of information for consumers. For this reason, both restaurants are advised to improve the price and portion communication system to be more in accordance with the principles of sharia law and economics, in order to provide better protection to consumers.

الملخص

رزقي أنيستا، ١٢٦١٠١٢١٢١٤٩، المراجعة الفقهية في منظور القانون المدني وتكييف القانون الاقتصادي الشرعي في معاملة البيع والشراء بنظام البوفيه (دراسة حالة مطعم بوفيه ب ت أ ومطعم بوفيه كارتيكا)، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، قسم الشريعة، جامعة سيد علي رحمة الله الإسلامية الحكومية، ٢٠٢٤ ، المشرف: هبة فجروا تي، سي. ح، ماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية : البيع والشراء، نظام الوفاء، القانون المدني، القانون المدني، تجميع القانون الاقتصادي الشرعي

إن الدافع وراء هذا البحث هو ظاهرة تطور نظام البيع والشراء بنظام البوفيه في مختلف المطاعم في إندونيسيا، بما في ذلك في منطقة تولونج اجونج، والتي تشمل مطاعم بتاو مطاعم كارتيكا كأهداف للبحث. أصبح نظام البوفيه، الذي يسمح للمستهلكين بشكل أساسي باختيار الطعام وأخذه وفقًا لرغباتهم قبل الدفع، خيارًا شائعًا للعديد من المستهلكين الذين يرغبون في الراحة والحرية في اختيار الطعام. على الرغم من أن هذا النظام يوفر الراحة للمستهلكين، إلا أنه لا تزال هناك العديد من المشاكل المتعلقة بعدم التأكد من سعر الطعام المشتراة وحصة الطعام، مما قد يتسبب في خسائر محتملة للمستهلكين ويؤثر على تنفيذ صفقة البيع والشراء نفسها.

وفي هذه الحالة، من المهم إجراء مزيد من التحليل لكيفية توافق نظام البيع والشراء في البوفيه مع الأحكام القانونية المعمول بها، سواء من منظور القانون المدني أو من منظور القانون الاقتصادي الشرعي. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى توفير فهم أعمق لكيفية تطبيق هذه القواعد القانونية في معاملات البيع والشراء بنظام البوفيه وكيف يمكن تعديل الممارسات التي تقوم بها المطاعم مع المبادئ القانونية المعمول بها.

صياغة المشكلة: 1) كيف تتم ممارسة بيع وشراء البوفيهات في مطاعم بتاو مطاعم كارتيكا في منطقة تولونج أجونج؟ 2) كيف ينظم القانون المدني ومجموعة القوانين الاقتصادية الشرعية عملية البيع والشراء بنظام البوفيه في البوفيهات؟ أهداف هذا البحث هي 1) التعرف على تطبيق ممارسة البيع والشراء بنظام البوفيه في مطعم باتو مطاعم كارتيكا في مقاطعة تولونج اجونج. 2) التعرف على مدونات القانون المدني ذات الصلة وتجميع القانون الاقتصادي الشرعي الذي ينظم البيع والشراء بنظام البوفيه.

وقد استخدم الباحثون في هذه الدراسة نوعاً من البحث الميداني بأساليب نوعية. ويستخدم هذا المنهج منهجاً فقهياً معيارياً. وفي جمع البيانات، استخدم الباحثون تقنيات المقابلة والملاحظة والتوثيق. بينما تستخدم تقنية تحليل البيانات في هذه الدراسة أسلوب تكثيف البيانات وعرض البيانات والاستنتاجات والتحقق منها. ويستخدم اختبار صحة البيانات في هذه الدراسة تقنية الملاحظة الموسعة، وزيادة المثابرة في الملاحظة، والتثليث.

تُظهر نتائج هذه الدراسة ما يلي: 1) تطبق ممارسة بيع وشراء البوفيهات في مطعم ب ت أ ومطعم كارتيكا نموذجًا تجاريًا يركز على الراحة والمرونة للزبائن. في مطعم رماح مكان كارتيكا، بدأ نظام البوفيه في مطعم رماح مكان كارتيكا من عادة الزبائن الذين يفضلون أخذ طعامهم بأنفسهم، بينما في مطعم رماح تم إدخال هذا النظام بعد تحليل السوق المحلي الذي أظهر عدم تطبيق هذا النموذج في المنطقة، BTA، مكان ويستخدم كلا المطعمين أنظمة دفع مختلفة. يطبق مطعم كارتيكا نظاماً يقوم فيه الزبائن باختيار الطعام وتسجيل الطلب والدفع بعد الوجبة بذكر أسمائهم. من ناحية أخرى، يستخدم مطعم ب ت أ نظاماً يقوم فيه الموظفون بتسجيل الطلبات مباشرةً على الطاولة ويتم الدفع عند الانتهاء من الوجبة، على الرغم من ظهور تحديات تتعلق بشفافية السعر. في كارتيكا، يتم احتساب السعر في مطعم كارتيكا على أساس الحصة الغذائية، بينما في ب ت أ ، يتم تحديد السعر حسب نوع الطبق الجانبي الذي يتم تناوله. وفي حين أن هذا النظام يوفر المرونة، إلا أن هناك ارتباكاً محتملاً للعملاء الجدد فيما يتعلق بالأسعار المطبقة. 2) تم تنفيذ ممارسة بيع وشراء البوفيهات في مطاعم ب ت أ ومطاعم كارتيكا في منطقة تولونج أجونج وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها، سواء من منظور القانون المدني (قانون المدني) أو من منظور القانون الاقتصادي الشرعي (ك ه إ س). في هذه الحالة، يطبق كلا المطعمين نظام البيع والشراء الذي يمكن تصنيفه على أنه معاملات بيع وشراء عادية، حيث يختار المشترون الطعام الذي يريدونه ويدفعون حسب السعر المحدد. لا تزال هذه الممارسة تواجه العديد من التحديات المتعلقة بشفافية الأسعار وعدم اليقين فيما يتعلق بكمية الطعام التي سيتم شراؤها، والتي يمكن أن تسبب ضررًا للمستهلكين إذا لم يتم توضيحها بوضوح. من وجهة نظر القانون المدني، يجب التمسك بمبادئ الحيطة والوضوح في عقد البيع والشراء. في حين أنه من المهم من منظور القانون المدني تجنب الممارسات

التي تحتوي على عناصر الغرر (الغرر) والربا (الربح غير العادل). فيما يتعلق بحكم القانون، ينظم القانون المدني التزام البائع بتقديم معلومات واضحة للمشتري، بما في ذلك سعر ومواصفات السلع أو الخدمات المعروضة. وبالمثل، يجب أن تتم المعاملات في ك ه إ س بنزاهة وشفافية وبدون أي عناصر احتيال. ولذلك، يوصى بأن تقوم المطاعم التي تطبق نظام البوفيه بتحسين جوانب شفافية الأسعار والمعلومات لتتوافق مع المبادئ القانونية المعمول بها، سواء من حيث القانون المدني أو الاقتصاد الإسلامي.

استناداً إلى نتائج هذه الدراسة، يمكن الاستنتاج أنه على الرغم من أن المطعمين قد أجريا معاملات البيع والشراء بنظام البوفيه، إلا أن هناك حاجة إلى التحسين، خاصة فيما يتعلق بشفافية الأسعار ووضوح المعلومات للمستهلكين. لهذا السبب، يُنصح كلا المطعمين بتحسين نظام الإبلاغ عن الأسعار والحصص ليكون أكثر توافقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية والاقتصاد، من أجل توفير حماية أفضل للمستهلكين.